

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sektor pertanian dan peternakan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Namun, di berbagai daerah, interaksi antara petani dan peternak sering kali menimbulkan konflik sosial. Salah satu penyebab utama adalah praktik pemeliharaan ternak secara lepas liar yang mengakibatkan kerusakan pada lahan pertanian milik petani. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kedua kelompok petani dan peternak, terutama ketika tidak ada regulasi yang jelas atau penegakan hukum yang efektif.

Konflik sosial adalah bagian alami dari kehidupan masyarakat, di mana individu dan kelompok sering kali mengalami perbedaan kepentingan, persaingan, serta pertentangan yang dapat memicu perubahan sosial. Sebagai makhluk konfliktris, manusia secara alami berhadapan dengan ketegangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan sosial, ekonomi. Konflik ini tidak hanya muncul akibat perbedaan pandangan, tetapi juga karena adanya perebutan sumber daya, ketimpangan sosial, serta perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Oleh karena itu, memahami dinamika konflik sosial menjadi penting dalam upaya mencari solusi yang dapat menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat (Kaharap & Dotrimensi, 2022).

Konflik sosial sering terjadi di pedesaan yang melibatkan masyarakat. Konflik sosial di pedesaan merupakan fenomena yang kerap terjadi akibat perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat. Salah satu bentuk konflik yang

sering muncul adalah antara petani dan peternak, terutama terkait penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Di berbagai daerah di Indonesia, konflik semacam ini telah menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Fathimah, dkk, 2021).

Salah satu contoh nyata terjadi di Nagari Bidar Alam, di mana konflik antara pemilik lahan pertanian dan pemilik hewan ternak dipicu oleh hewan ternak yang merusak tanaman pertanian. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran pemilik ternak, lemahnya penerapan aturan, dan minimnya peran pemerintah dalam penyelesaian konflik turut memperparah situasi (Romi, dkk, 2022).

Kemudian, terjadi nya konflik di Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, menunjukkan bahwa konflik antara petani dan peternak dipicu oleh kerusakan tanaman akibat ternak lepas, perbedaan pemahaman regulasi, serta alih fungsi lahan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan harmonis dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian (Yunanda, dkk, 2024).

Perubahan struktur sosial dan pemanfaatan lahan yang terjadi di Desa Sei Sigiling menunjukkan adanya ketegangan antara tradisi lama dengan kondisi baru masyarakat. Tradisi melepas ternak yang dulunya tidak menimbulkan masalah karena lahan masih luas dan tidak banyak digarap, kini menjadi sumber konflik karena seluruh lahan sudah digunakan untuk pertanian. Ketegangan ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara petani dan peternak, tetapi juga karena belum adanya aturan sosial yang mampu mengakomodasi perubahan tersebut secara adil.

Konflik agraria di tingkat lokal umumnya dipicu oleh perubahan pemanfaatan lahan yang tidak dibarengi dengan pembaruan sistem sosial dan regulasi yang adil serta responsif terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bukan sekadar persoalan individu, tetapi berkaitan erat dengan ketiadaan adaptasi sosial terhadap perubahan struktur ruang dan ekonomi di pedesaan (Iskandar, 2021).

Desa Sei Sigiling merupakan bagian dari Kelurahan Tebing Tinggi di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Padang Hilir terdiri dari tujuh kelurahan, yaitu Bagelen, Tebing Tinggi, Tambangan, Satria, Deblod Sundoro, Damar Sari, dan Tambangan Hulu. Dalam sektor pertanian dan peternakan, Kecamatan Padang Hilir memiliki lahan pertanian yang digunakan untuk berbagai komoditas. Selain itu, terdapat populasi ternak seperti kambing, sapi, Kerbau, dan bebek serta ayam yang cukup signifikan. Kehadiran hewan ternak ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan konflik dengan petani, terutama jika terjadi kerusakan tanaman akibat ternak yang berkeliaran. Desa Sei Sigiling, dengan karakteristik sosial dan ekonominya, menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji konflik sosial antara petani dan peternak. Pemahaman mendalam tentang kondisi Desa ini akan membantu dalam merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi konflik tersebut (BPS Tebing Tinggi, 2024).

Berdasarkan pengamatan awal di Desa Sei Sigiling, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, fenomena serupa juga terjadi. Petani mengeluhkan kerusakan tanaman akibat ternak yang dilepas bebas oleh peternak, sementara peternak merasa memiliki hak untuk memanfaatkan lahan secara bebas. Ketidakharmonisan ini

diperparah oleh kurangnya peraturan Desa yang mengatur pemeliharaan ternak dan minimnya peran pemerintah setempat dalam mediasi konflik. Konflik semacam ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, seperti penurunan hasil panen dan pendapatan petani, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial antarwarga. Ketegangan yang berlarut-larut dapat mengganggu stabilitas sosial dan menghambat pembangunan Desa secara keseluruhan (Observasi awal, 25 maret 2025).

Berdasarkan wawancara awal dengan salah seorang petani Fenomena Konflik Sosial antara Petani dan Peternak di Desa Sei Sigiling dimana Desa ini memiliki karakteristik pedesaan dengan masyarakat yang umumnya bekerja di sektor pertanian dan peternakan dalam skala kecil hingga menengah. Aktivitas ekonomi masyarakat setempat sangat bergantung pada hasil tani seperti ubi kayu, sawit, serta usaha peternakan sapi. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi ketegangan sosial yang meningkat antara kelompok petani dan peternak. Konflik ini utamanya dipicu oleh praktik pemeliharaan ternak secara lepas, di mana hewan-hewan ternak sering kali dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan yang memadai. Akibatnya, ternak-ternak tersebut sering memasuki lahan pertanian warga dan merusak tanaman yang sedang tumbuh, seperti ubi kayu, sawit dan tanaman lainnya yang di tanam sebagai tanaman sampingan.

Kerusakan tanaman menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi petani, terutama di musim tanam. Hal ini memunculkan rasa tidak puas, marah, dan frustrasi dari pihak petani terhadap pemilik ternak, yang dianggap tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, pemilik ternak sering beralasan bahwa tidak

tersedia lahan khusus atau padang penggembalaan, sehingga ternak dilepas bebas demi efisiensi. Konflik ini juga diperparah oleh:

- 1) Kurangnya peraturan desa (perdes) yang mengatur secara tegas pengelolaan ternak.
- 2) Minimnya sosialisasi dan mediasi dari pihak pemerintah desa atau aparat setempat.
- 3) Rendahnya kesadaran hukum serta partisipasi warga dalam menyelesaikan konflik secara musyawarah.
- 4) Tidak adanya mekanisme ganti rugi yang jelas bagi petani yang lahannya rusak.

Dalam beberapa kasus, konflik ini sempat memanasi hingga melibatkan adu mulut, ancaman, dan pelaporan ke aparat desa. Meski belum sampai pada konflik fisik yang terbuka, ketegangan sosial yang berlangsung lama dapat mengganggu kerukunan warga dan stabilitas sosial desa (Wawancara awal, Edi Septiawan, 26 maret 2025).

Fenomena ini menunjukkan pentingnya dilakukan kajian ilmiah untuk memahami akar konflik secara sosiologis, bagaimana dinamika antar kelompok berlangsung, dan berkelanjutan yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang apa yang mendorong terjadinya konflik sosial antara petani dan peternak di Desa Sei Sigiling, serta bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh petani terhadap pemilik ternak yang melepasliarkan hewan peliharaannya. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena menyangkut ketegangan dalam kehidupan sosial

masyarakat desa, terutama ketika tidak adanya regulasi atau kesepakatan bersama menimbulkan ketimpangan dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika konflik tersebut, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam merumuskan pendekatan penyelesaian yang adil dan partisipatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa yang mendorong terjadinya konflik sosial antara petani dan peternak di Desa Sei Sigiling?
2. Bagaimana bentuk perlawanan petani terhadap pemilik ternak yang di lepas liarkan?

1.3 Fokus Penelitian

1. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui yang mendorong terjadinya konflik sosial antara petani dan peternak di Desa Sei Sigiling
- 2 Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana bentuk perlawanan petani terhadap pemilik ternak yang di lepas liarkan

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui yang mendorong terjadinya konflik sosial antara petani dan peternak di Desa Sei Sigiling.
2. Untuk mengetahui bentuk perlawanan petani terhadap pemilik ternak yang di lepas liarkan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian sosiologi pedesaan dan konflik sosial. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang dinamika konflik agraria di tingkat lokal, serta memperluas pemahaman mengenai hubungan sosial antar kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa dalam konteks wilayah atau kondisi sosial yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Masyarakat Desa Sei Sigiling, khususnya petani dan peternak, sebagai bahan refleksi atas konflik yang terjadi dan mendorong terciptanya solusi berbasis kesepakatan bersama.
2. Pemerintah desa dan pemangku kebijakan lokal, sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan atau peraturan desa (perdes) yang lebih adil dan efektif dalam mengelola hubungan antar kelompok masyarakat serta mencegah konflik serupa di masa mendatang.
3. Lembaga sosial dan tokoh masyarakat, agar dapat lebih berperan aktif dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik dengan pendekatan yang partisipatif dan berkelanjutan.